

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA *STREAMER AFFILIATE* DENGAN
PARA PIHAK DALAM *LIVE STREAMING* DI PLATFORM TIKTOK
SHOP DAN DAMPAK PADA PEMENUHAN HAK NORMATIF
KETENAGAKERJAAN**

INTISARI

Oleh:

Ingwhy Kacanusa¹ dan Nailul Amany²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum yang timbul antara *streamer* dengan platform TikTok *Shop* dan *streamer affiliate* dengan *seller* dalam kegiatan *live streaming*. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak hubungan hukum pada pemenuhan hak-hak normatif ketenagakerjaan *streamer affiliate*.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yang mengkolaborasikan pendekatan hukum normatif (*statute approach*) dengan pendekatan empiris (*socio legal approach*). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena ketenagakerjaan dalam kegiatan *live streaming* TikTok *Shop*. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara responden (*streamer affiliate*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan dua bentuk hubungan hukum. Pertama, hubungan hukum antara *streamer affiliate* dengan TikTok *Shop* merupakan hubungan kemitraan dalam penyediaan layanan *live streaming* berdasarkan perjanjian baku. Kedua, hubungan hukum antara *streamer affiliate* dengan *seller* merupakan hubungan penyediaan jasa layanan *live streaming* berdasarkan perjanjian jasa. Selain itu, juga ditemukan adanya hubungan kerja non-standar dalam bentuk "*dependent self employment*". Dikarenakan bentuk hubungan hukum yang ditemukan di luar hubungan kerja, maka pemenuhan hak normatif ketenagakerjaan terhadap *streamer affiliate* belum bisa terpenuhi.

Kata Kunci: Hubungan hukum, Hubungan non-standar, *Streamer affiliate*, hak normatif ketenagakerjaan.

¹ Mahasiswa Program Sarjana (S1), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

THE LEGAL RELATIONSHIPS BETWEEN STREAMER AFFILIATE AND RELATED PARTIES ON LIVE STREAMING TIKTOK SHOP PLATFORM AND THEIR IMPACT ON THE FULFILLMENT OF NORMATIVE LABOUR RIGHTS

ABSTRACT

By:

Ingwhy Kacanusa¹ dan Nailul Amany²

This research aims to examine and analyse the legal relationships that arise between streamer affiliates and TikTok Shop platform, as well as between streamer affiliates and sellers in live streaming activities. In addition, this research seeks to identify the impact of such legal relationships on the fulfilment of normative labour rights for streamer affiliates.

This research adopts a normative-empirical approach, combining the normative legal approach (statute approach) with the empirical (socio-legal approach). It is classified as descriptive research, aiming to provide a comprehensive overview of employment-related phenomena within live streaming activities on TikTok Shop. This research utilises primary data obtained through interviews with respondents (streamer affiliates), as well as secondary data gathered through literature review. These data are then analysed using a qualitative analysis method.

The findings are two types of legal relationships outside of employment relationships. First, the legal relationship between streamer affiliates and TikTok Shop platform is a live streaming service provider and a user, based on a standard electronic agreement. Second, the legal relationships between streamer affiliates and sellers is service provider and client, based on a service agreement. Furthermore, the research identifies the existence of non-standard employment relationships in the form of “dependent self-employment”. Due to the nature of legal relationships identified falling outside the scope of an employment relationship, the fulfilment of normative labour rights for streamer affiliates have yet to be adequately yet.

Keyword: *Legal relationship, Non-standard employment relationship, Streamer affiliate, Normative labour rights.*

¹ Mahasiswa Program Sarjana (S1), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.